



LKJIIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah T.A 2025

DINAS TENAGA KERJA,
KOPERASI DAN UKM
KOTA JAMBI

☎ 0741- 446344

✉ disnakerkopukmjambi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi tahun anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat waktu berdasarkan ketentuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat informasi capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025, yang bermuara pada pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga, Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun anggaran 2025 ini menjadi bahan acuan untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian laporan ini kami susun dengan harapan dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jambi, 14 Januari 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi dan UKM Kota Jambi



LIANA ANDRIANI, S.T.P., M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701004 199803 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Struktur Organisasi	3
1.2. Tugas dan Fungsi	8
1.3. Isu – isu Strategis	9
1.4. Kepegawaian	11
1.5. Keadaan Sarana Prasarana	12
1.6. Keuangan	13
1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1. Perencanaan Strategis	15
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	15
2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah.....	17
2.1.2.1. Tujuan Perangkat Daerah	17
2.1.2.2. Sasaran Perangkat Daerah.....	20
2.1.2.3. Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	21
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	23
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025.....	28
2.3.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	38
3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun ini	39

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu.....	42
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	43
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional/ Provinsi	44
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	45
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	47
3.2. Realisasi Anggaran 2024.....	66
BAB IV PENUTUP.....	72
4.1. Kesimpulan.....	72
4.2. Rencana Tindaklanjut.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Klasifikasi Jabatan	11
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.3. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat	12
Tabel 1.4. Aset Pendukung Kinerja.....	12
Tabel 1.5. Keuangan Tahun 2025.....	13
Tabel 2.1. Sasaran Strategis Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029	17
Tabel 2.2. Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.....	21
Tabel 2.3. Sasaran Program dan Kegiatan	22
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 2.5. Target Kinerja Program Tahun 2025.....	24
Tabel 2.6. Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2025.....	29
Tabel 2.7. Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis.....	30
Tabel 2.8. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	32
Tabel 3.1. Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja	38
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	39
Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025	42
Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 & 2024.....	43
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja	44
Tabel 3.6. Efisiensi Sasaran.....	47
Tabel 3.7. Rincian Bantuan Barang/Peralatan yang Diberikan	61
Tabel 3.8. Realisasi Anggaran 2025	66
Tabel 3.9 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh elemen yang berkontribusi dalam pembangunan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya, maka setiap akhir tahun anggaran instansi pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi sebagai instansi pemerintah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, perkoperasian dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) melakukan berbagai upaya yang diimplemetasikan dalam bentuk program, kegiatan

dan sub kegiatan guna meningkatkan kualitas pencari kerja, hubungan industrial, pengurus/pengelola koperasi dan pelaku UMKM serta pemberdayaan aspek-aspek pendukungnya, sehingga paradigma pemberdayaan dan pembinaan tenaga kerja, koperasi dan UMKM diharapkan lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, partisipasi, inovasi dan berdaya saing.

Pembangunan bidang tenaga kerja, koperasi dan UMKM pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, maupun kelompok dalam rangka peningkatan harkat martabat dan kualitas hidup, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai sosial yang timbul dan merupakan salah satu wujud nyata dari pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Dan pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025, dirangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi, dimana dengan penyusunan laporan ini diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;

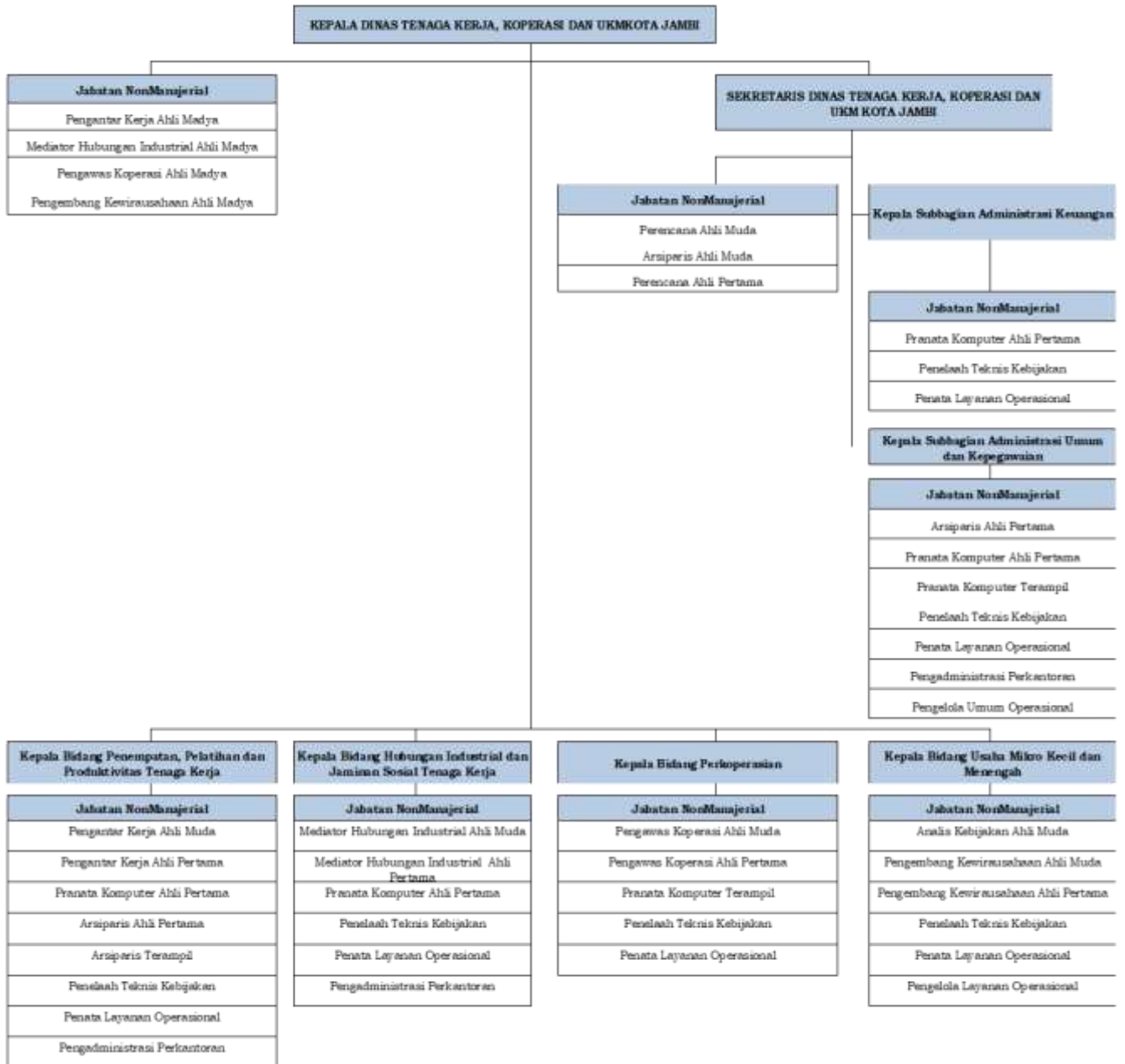
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah urusan ketenagakerjaan dan urusan koperasi dan UKM.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 57 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi, dapat dilihat secara rinci struktur organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi



1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan, perkoperasian dan usaha kecil menengah serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja serta perkoperasian dan usaha kecil menengah;
2. Penyusunan perencanaan di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja serta perkoperasian dan usaha kecil menengah;
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah;
4. Penyusunan program dan anggaran;
5. Pengelolaan administrasi keuangan;
6. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
7. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara;
8. Pelaksanaan kebijakan pelayanan penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
9. Pelaksanaan kebijakan pelayanan hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja;

10. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perkoperasian;
11. Pelaksanaan kebijakan pelayanan usaha kecil menengah;
12. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan bidang urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah;
13. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
14. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
15. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup urusan koperasi, usaha menengah dan tenaga kerja; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi signifikan yang menentukan arah pembangunan suatu wilayah, dimana kondisi tersebut harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan guna menetapkan solusi terintegrasi untuk tahapan pembangunan berkelanjutan. Isu strategis dapat di analisa dari kondisi yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Adapun isu-isu strategis dalam pembangunan ketenagakerjaan, perkoperasian dan UMKM, yaitu :

a. Ketenagakerjaan

1. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
2. Stabilitas ekonomi;
3. Bonus demografi yang belum dikelola dengan maksimal;
4. Penyebaran tenaga kerja belum merata;
5. Kesenjangan antara keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja;
6. Transformasi digital dunia kerja;
7. Perlindungan tenaga kerja formal dan informal;
8. Kebijakan manajemen tenaga kerja asing;
9. Kebijakan hubungan industrial.

b. Perkoperasian

1. Penguatan kelembagaan dan pengawasan koperasi;
2. Peningkatan akses pembiayaan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Regulasi dan kebijakan yang mendukung;
5. Transformasi digital di dunia pengelolaan jasa keuangan.

c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Peningkatan akses pembiayaan untuk meningkatkan modal usaha;
2. Regulasi dan kebijakan terkait standarisasi produk dan legalitas usaha;
3. Inovasi produk dan jaringan pemasaran;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
5. Transformasi digital di dunia usaha.

Dari isu strategis diatas diketahui bahwa pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM merupakan aspek-aspek yang saling terkait dalam pembangunan ekonomi. Ketiganya harus berjalan seiring untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi memiliki sumber daya manusia yang berperan langsung dalam pelaksanaan program kegiatan guna mencapai target kinerja. Per tanggal 31 Desember 2025 terdapat 62 (enam puluh dua) ASN yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang PNS dan 37 (tiga puluh tujuh) orang PPPK.

Secara terperinci, klasifikasi sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

No	Jabatan	Formasi	Terisi	Ket
1	Eselon II	1	1	-
2	Eselon III	5	4	-
3	Eselon IV	2	2	-
4	JFT Ahli Madya	4	0	-
5	JFT Ahli Muda	16	8	-
6	JFT Ahli Pertama	39	22	-
7	JFU	37	25	-
	Jumlah	104	62	

Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	10	15	25
2	PPPK	20	17	37
	Jumlah	30	32	62

Tabel 1.3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Ket
1	IV/c	1	
2	IV/b	1	
3	IV/a	3	
4	III/d	15	
5	III/c	2	
6	III/b	2	
7	III/a	1	
8	IX	26	
9	VII	4	
10	V	4	
11	I	3	
	Jumlah	62	

Sumber data : sub bagian adm umum dan kepegawaian DTKK-UKM

1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 1.4 : Aset pendukung kinerja

NO	NAMA BARANG	TOTAL	KONDISI BARANG			TOTAL
			B	RR	RB	
A	Alat - Alat Angkutan					
1	Kendaraan Roda 4 - Mobil Dinas	7	6	1		7
2	Kendaraan Roda 2 - Motor Dinas	17	15	2		17
B	Alat - Alat Rumah Tangga					
1	AC	34	25		9	34
2	Komputer (PC)	32	30		2	32
3	Laptop	25	16		9	25
4	Notebook	1	0		1	1
5	Filling Kabinet	9	9		0	9
6	Printer	44	34		10	44
7	Scanner	6	6		0	6
8	Meja	112	68		44	112
9	Kursi	135	110		25	135
10	Lemari	37	35		2	37
11	Kulkas	2	2			2
12	Proyektor	4	3		1	4

Sumber data : sub bagian adm umum dan kepegawaian DTKK-UKM

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi di dukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 10.036.268.000,-** (Sepuluh Milyar Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)

Anggaran yang disediakan ini diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Anggaran Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5 : Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Ket
I	BELANJA DAERAH		
1	BELANJA OPERASI	9.961.382.595,93	
	Belanja Pegawai	5.551.547.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	4.409.835.595,93	
2	BELANJA MODAL	74.885.404,07	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.885.404,07	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	
	Total Anggaran	10.036.268.000,00	

Sumber data : Sub Bagian Pengelola Adm Keuangan DTKK-UKM

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran yang digunakan. Dan disertai dengan penjelasan secara rinci bila terjadi perubahan pada indikator kinerja ataupun target saat tahun berjalan.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

5. LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar pembangunan yang dilaksanakan mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional hingga global. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan potensi, peluang dan kendala yang di hadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strtategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan instansi pemerintah yang menjabarkan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta masing-masing indikator dan target kinerjanya yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Nomor 43.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Tahun Anggaran 2025-2029.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029. Adapun Visi yang

tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 yaitu :

“MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. **Misi 1** : Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia ;
2. **Misi 2** : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan ;
3. **Misi 3** : Penguatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik ;
4. **Misi 4** : Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan Serta Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan ;
5. **Misi 5** : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan ;

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Koperasi UMKM, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi mendukung mengakomodir misi ke-2 (dua) : **Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan.**

Misi ke-2 (dua) dijabarkan dalam 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator, yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier
Indikator : Kontribusi Sektor Tersier Terhadap PDRB
2. Sasaran 2 : Peningkatan Realisasi Investasi
Indikator : Realisasi Investasi

3. Sasaran 3 : Terkendalinya Inflasi

Indikator : Laju Inflasi

4. Sasaran 4 : Penurunan Gini Ratio

Indikator : Gini Ratio

5. Sasaran 5 : Penurunan Pengangguran

Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka

6. Sasaran 6 : Peningkatan Daya Saing Daerah

Indikator : Indeks Daya Saing Daerah

Dari rincian misi, sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029, kontribusi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dapat dirinci sebagai berikut :

- Misi : ke -2 ➔ Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan
- Sasaran : (4) Penurunan Gini Ratio
(5) Penurunan Pengangguran
- Indikator : (4) Gini Ratio
(5) Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.2.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kepala daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu dokumen perencanaan.

Tujuan perangkat daerah pada hakekatnya membantu kepala daerah menyelenggarakan urusan pemerintah, melaksanakan

pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan tugas dan fungsi yang terstruktur, sistematis, serta akuntabel, melalui penjabaran visi misi kepala daerah menjadi program yang terukur, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Mengacu kepada visi, misi, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi menjadi leading sektor pencapaian target kinerja penurunan tingkat pengangguran terbuka dan gini ratio.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi angka tingkat pengangguran terbuka dan gini ratio, yaitu :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

- a) Pertumbuhan ekonomi ;
- b) Pertumbuhan Penduduk ;
- c) Iklim Investasi ;
- d) Tingkat Inflasi ;
- e) Tingkat Pendidikan ;
- f) Ketersediaan Lapangan Kerja ;
- g) Keterampilan/Keahlian Tenaga Kerja/Pencari Kerja

2. Gini Ratio

- a) Kebijakan Pemerintah (pajak,bantuan social) ;
- b) Akses Pendidikan dan Kesehatan ;
- c) Pasar Kerja (tingkat pengangguran terbuka, upah minimum,

kesenjangan upah, keterampilan/keahlian pencari kerja/tenaga kerja) ;

- d) Tingkat Kemiskinan ;
- e) Pertumbuhan Penduduk ;
- f) Kondisi Geografis dan Struktur Sosial ;
- g) Teknologi ;
- h) Iklim Investasi.

Dari beberapa faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan gini ratio, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi berperan dalam memfasilitasi keterbukaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan/keahlian tenaga kerja/pencari kerja, serta pasar kerja (tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, kesenjangan upah).

Berkaitan dengan kontribusi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka dan gini ratio, maka ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2025-2029 adalah:

Menurunkan Angka Pengangguran dan Kesenjangan Pendapatan Penduduk Melalui Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga kerja, Koperasi dan UMKM yang Mandiri

Dengan indikator tujuan :

1) Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dan

keselarasan hubungan industrial;

2) Persentase peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

2.1.2.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dokumen perencanaan dapat tercapai.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 :

Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi
 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Menurunkan angka pengangguran dan kesenjangan pendapatan penduduk melalui pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja, koperasi dan UMKM yang mandiri	1 Meningkatnya penyerapan pencari kerja dan perlindungan tenaga kerja	Indikator Tujuan :						
			1 Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dan keselaran hubungan industrial	29.50%	31.25%	33.00%	34.75%	36.50%	36.50%
			2 Persentase peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM	27.40%	31.80%	36.70%	41.60%	46.50%	46.50%
			Indikator Sasaran :						
			1.1 Persentase penempatan pencari kerja terdaftar	45.00%	48.00%	51.00%	54.00%	57.00%	57.00%
			1.2 Persentase perusahaan dengan tata kelola yang layak	14.00%	14.50%	15.00%	15.50%	16.00%	16.00%
2 Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	2.1 Persentase koperasi berkualitas	46.80%	48.60%	50.40%	52.00%	54.00%	54.00%		
	2.2 Persentase UMKM yang tangguh dan mandiri	8.00%	15.00%	23.00%	31.00%	39.00%	39.00%		

2.1.2.3. Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi pada tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3 : Sasaran Program dan Kegiatan

Laporan Kinerja 2025

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Penempatan Pencari Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	1.1 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.1.1 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1.1.1.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
			1.1.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1.1.1.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		1.2 Penempatan Tenaga Kerja	1.2.1 Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.2.1.1 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
			1.2.2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1.2.2.1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
		1.3 Hubungan Industrial	1.3.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.3.1.1 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
				1.3.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2.1.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.1.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
		2.2 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.2.1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.2.1.1 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
	2.2.1.2 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
	2.2.1.3 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
	2.2.1.4 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			
	2.3 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.3.1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.3.1.1 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			2.3.1.2 Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	
			2.3.1.3 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
			2.3.1.4 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi pengacu pada Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan anggaran atau DPA.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya penyerapan pencari kerja dan perlindungan tenaga kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	%	45.00
		Persentase Perusahaan Dengan Tata Kelola Yang Layak	%	14.00
2	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah	Persentase Koperasi Berkualitas	%	46.80
		Persentase UMKM Yang tangguh dan Mandiri	%	8.00

Dapat dilihat pada tabel 2.4 bahwa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi memiliki 4 (empat) indikator sasaran, yang terdiri dari 2 (dua) indikator urusan ketenagakerjaan dan 2 (dua) indikator urusan koperasi UKM. Dan masing-masing indikator sasaran telah ditetapkan target yang harus dicapai. Untuk mencapai target tersebut diperlukan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang diimplementasikan dalam pemilihan program-program kerja sesuai dengan Permendagri No. 90 tahun 2019. Program-program tersebut dipilih berdasarkan prioritas target yang akan dicapai dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan.

Program-program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM di tahun 2025 guna mendukung capaian sasaran, secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 : Target Kinerja Program Tahun 2025

No	Program	Indikator program	Satuan	Target
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang dilatih untuk menjadi TKM dan bekerja	%	62.00
2.	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja terdaftar	%	45.00
3.	Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	%	60.00
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus koperasi yang berkompentensi	%	55.00
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase omset koperasi	%	29.00
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan UMKM yang dibina	%	32.00

Untuk urusan ketenagakerjaan dengan 2 (dua) indikator sasarannya, yaitu persentase penyerapan tenaga kerja dan persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ditetapkan 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator program yaitu : persentase pencari kerja terdaftar yang dilatih untuk menjadi tenaga kerja mandiri (TKM) dan bekerja. Program ini melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja terdaftar (pencari kerja yang memiliki kartu AK1). Dengan memiliki keahlian berkompotensi, diharapkan pencari kerja mudah untuk mendapatkan pekerjaan ataupun membuka usaha sebagai tenaga kerja mandiri.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator program yaitu : persentase penempatan tenaga kerja terdaftar. Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pencari kerja agar dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia sesuai dengan minat dan kemampuannya. Program ini melaksanakan pelayanan antar kerja melalui informasi pasar kerja online maupun offline (Job Fair), pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan pembinaan Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta (LPKS) sebagai mitra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dalam meningkatkan keahlian pencari kerja.

3. Program Hubungan Industrial

Indikator program yaitu : persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak. Dalam program ini dilaksanakan pendataan dan pembinaan bagi perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Jambi yang bertujuan untuk meningkatkan standar tata kelola setiap perusahaan sesuai

dengan peraturan ketenagakerjaan. Sekaligus juga melaksanakan kegiatan rutin pembinaan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota, sebagai mitra dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Dengan program ini diharapkan pemilik usaha dan pekerja memahami serta mematuhi kewajiban masing-masing dan mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Sehingga perselisihan hubungan industrial yang dapat merugikan masing-masing pihak dapat dihindari, bahkan jika masih terjadi perselisihan, dapat dimediasi dengan berpedoman pada peraturan yang ada untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi kedua belah pihak. Karena hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha menjadi faktor utama terciptanya kondisi ketenagakerjaan yang kondusif.

Ketiga program yang dilaksanakan pada urusan ketenagakerjaan ini memiliki target capaian yang saling mendukung dan bermuara pada upaya pemerintah Kota Jambi untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Jambi.

Sedangkan untuk urusan koperasi dan UKM, yang juga memiliki 2 (dua) indikator sasaran yaitu persentase usaha mikro yang berkualitas dan persentase koperasi berkualitas, ditetapkan 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Indikator program yaitu : persentase pengurus koperasi yang berkompentensi. Dalam program ini dilaksanakan pembinaan bagi pengurus/pengelola dan pengawas koperasi dalam bentuk kegiatan pelatihan, baik penyusunan laporan keuangan koperasi secara manual, penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis IT (aplikasi SIAKop)

hingga penyusunan laporan pengawasan koperasi dan laporan pengawasan kesehatan keuangan bagi koperasi simpan pinjam maupun unit usaha simpan pinjam koperasi (KSP/USP). Dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan, diharapkan pengurus/pengelola koperasi dapat menjalankan usaha koperasi dengan tertib sesuai peraturan, dapat menyusun laporan keuangan yang sehat, dapat melaksanakan RAT tepat waktu.

Program ini juga mencakup pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM binaan dengan bentuk kegiatan coaching clinic administrasi izin usaha bagi UMKM dan pelatihan manajerial (penyusunan laporan keuangan usaha). Dari kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM, dapat menata usahanya lebih baik, tidak hanya prioritas pada usaha produksi tetapi juga dapat meningkatkan kualitas usaha melalui ketertiban dokumen perizinan usaha yang menjadi syarat memasuki pasar, meningkatkan jaringan pemasaran melalui pasar online hingga dapat mengelola keuangan usaha yang baik sebagai upaya untuk meningkatkan level kualitas usahanya.

2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Indikator program yaitu : persentase omset koperasi. Dalam program ini dilaksanakan kegiatan bintek penyusunan peraturan kelembagaan koperasi, sebagai langkah awal bagi koperasi untuk menambah unit usahanya. Diharapkan dengan bertambahnya unit usaha, koperasi mampu meningkatkan omset yang dikelola dan laba yang dihasilkan.

3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator program yaitu : persentase peningkatan UMKM yang dibina. Dalam program ini dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pembentukan kelompok usaha, baik secara mandiri maupun yang dikoordinir oleh kelurahan setempat. Kelompok usaha yang telah terbentuk, dibina untuk melengkapi dokumen administrasinya (pembentukan pengurus dan tata tertib kelompok) untuk memudahkan bagi kelompok tersebut mengelola kelompok secara mandiri dan dapat diikutsertakan dalam setiap event yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, mulai dari pemberian/hibah barang (bantuan alat), kegiatan pameran/bazar, hingga kegiatan kurasi produk. Dengan bantuan peralatan yang diberikan, diharapkan pelaku UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi dan berinovasi membuat produk yang mampu bersaing untuk dikurasi menjadi produk unggulan dan layak untuk diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan pameran, sehingga kedepannya produk tersebut mampu membuka pangsa pasar yang lebih luas.

Sama halnya dengan urusan ketenagakerjaan, ketiga program yang dilaksanakan pada urusan koperasi dan UKM, memiliki target capaian yang saling mendukung dan bermuara pada upaya pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM.

2.3. Rencana Anggaran Tahunan 2025

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp. 10.760.790.000,-** (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus

sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Belanja Operasi sebesar **10.706.510.000,-** (sepuluh milyar tujuh ratus enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan Belanja Modal sebesar **Rp. 54.280.000,-** (lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sedangkan anggaran perubahan menjadi **10.036.268.000,-** (sepuluh milyar tigapuluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian belanja operasi sebesar **9.961.382.596,-** (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Belanja Modal sebesar **Rp. 74.885.404,-** (tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat rupiah).

Tabel 2.6 : Target Belanja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi
APBD Perubahan Tahun 2025

No	URAIAN	TARGET	Satuan	Target
1	BELANJA OPERASI	Rp 9,961,382,596	%	99.25
1	Belanja Pegawai	Rp 5,551,547,000	%	55.73
1	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4,409,835,596	%	44.27
2	BELANJA MODAL	Rp 74,885,404	%	0.75
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 74,885,404	%	100.00
JUMLAH		Rp 10,036,268,000	%	100.00

2.3.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 : Anggaran Belanja Per Sasaran strategis

No	Sasaran	Program		Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya penyerapan pencari kerja dan perlindungan tenaga kerja	1.1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6,847,986,126	68.23%
		1.2	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 192,094,130	1.91%
		1.3	Penempatan Tenaga Kerja	Rp 129,579,005	1.29%
		1.4	Hubungan Industrial	Rp 909,622,968	9.06%
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 80,964,414	0.81%
		2.2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 463,640,941	4.62%
		2.3	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 1,412,380,417	14.07%
Jumlah				Rp 10,036,268,000	100.00%

Dari tabel 2.6 diketahui bahwa total anggaran pada DPA-Perubahan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2025 adalah **Rp. 10.036.268.000,-** (sepuluh milyar tigapuluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), jumlah tersebut adalah jumlah keseluruhan yang juga digunakan untuk kegiatan pendukung di bidang sekretariat. Jumlah anggaran di bidang sekretariat sebesar **Rp. 6.847.986.126,-** (enam milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah).

Sedangkan anggaran untuk sasaran strategis sebesar **Rp. 3.188.281.875,-** (tiga milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis tersebut digunakan untuk membiayai 6 (enam) program yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dan 16

(enam belas) sub kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi, sebagaimana lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut:

tabel 2.8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN															
							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	9	8															
1	Program Pelatihan Kerja dan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Pelatihan berbasis Kompetensi	204,855,396	Kepala Bidang Penta Latas																
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Sosialisasi tentang perizinan LPK dan Akreditasi LPK	21,397,401	Kepala Bidang Penta Latas																
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Pencetakan Kartu AKI	97,592,250	Kepala Bidang Penta Latas																
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/ Bursa Kerja	Job Fair / Bursa Kerja	67,800,000	Kepala Bidang Penta Latas																
		Pelayanan antar Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pembinaan BKK	38,318,685	Kepala Bidang Penta Latas																

3	Program Hubungan Industrial	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Rapat Tripartit, Depeko dan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan	886,478,597	Bidang Hubungan Industrial													
4	Program Hubungan Industrial	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Pelaksanaan Pendataan Sarana Hubungan Industrial	Pelaksanaan Pendataan Sarana Hubungan Industrial	23,144,370	Bidang Hubungan Industrial													
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Koperasi (SIKop)	59,269,414	Kepala Bidang Perkoperasian													
				Pelatihan Pengawasan bagi Pengawas Koperasi	21,695,000	Kepala Bidang Perkoperasian													

6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pelatihan Perkoperasian bagi kelompok pra Koperasi	38,736,000	Kepala Bidang Perkoperasian																
			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Launching Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Jambi	9,435,120	Kepala Bidang Perkoperasian																
			Rapat Satuan Tugas Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Jambi	3,585,120	Kepala Bidang Perkoperasian																	
			Sosialisasi Perkoperasian Koperasi Kelurahan Merah Putih	163,876,196	Kepala Bidang Perkoperasian																	
			Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	170,000,000	Kepala Bidang Perkoperasian																	

			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi	48,613,469	Kepala Bidang Perkoperasian												
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi	24,397,987	Kepala Bidang Perkoperasian												
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaa Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro dan kegiatan Pokir	1,127,860,479	Kepala Bidang UMKM												

8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Teknis	215,183,340	Kepala Bidang UMKM																		
				Pelatihan Manajerial																				
				Pelatihan Pengolahan Makanan																				
9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Melakukan Survei lapangan ke lokasi pengusaha UMKM	32,017,438	Kepala Bidang UMKM																		

10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Pemdampingan Pembuatan Sertifikat Halal	49,271,610	Kepala Bidang UMKM												
----	---	---	--	---	------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi ke depan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.1 : Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

No	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	≥ 90
2	Baik	75,00 - 89,9
3	Cukup	65,00 - 74,99
4	Kurang	50,00 - 64,99
5	Sangat Kurang	0 - 50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

Kota Jambi tahun 2025 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Rumusan	Target 2025	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyerapan pencari kerja dan perlindungan tenaga kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	$\frac{\text{Jmh Pencaker Ditempatkan}}{\text{Jmh Pencaker Terdaftar}} \times 100\%$	45.00%	60.97%	135.48%
			Persentase Perusahaan Dgn Tata Kelola Yg Layak	$\frac{\text{Jmh Perusahaan Dgn Tata Kelola Yg Layak}}{\text{Jmh Perusahaan Wajib Lapor}} \times 100\%$	14.00%	16.47%
		Persentase Koperasi Berkualitas		$\frac{\text{Jmh Koperasi Berkualitas}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$	46.80%	43.64%
			Persentase UMKM Yg Tangguh dan Mandiri	$\frac{\text{Jmh UMKM Yg Berwirausaha}}{\text{Jmh UMKM Binaan}} \times 100\%$	8.00%	12.03%

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dapat dilihat untuk tahun 2025, capaian indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, masing-masing sebagai berikut :

1. Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar

Indikator kinerja ini menjadi tanggung jawab Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Capaian kinerja indikator ini sebesar 135.48%, dari realisasi 60.97% melebihi target yang ditetapkan yaitu 45.00%. Capaian ini diperoleh dari rasio jumlah pencari ditempatkan dengan jumlah pencari terdaftar. Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan selama tahun 2025 berjumlah 503 orang, sedangkan pencari kerja terdaftar berjumlah 825 orang.

Di tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM telah mengadakan pelatihan Content Creator kepada 16 orang pencari terdaftar, dan mengadakan kegiatan job fair berhasil menempatkan sebanyak 503 orang pencari untuk mengisi lowongan pada pasar kerja baik online ataupun offline (total pencari terdaftar 825 orang). serta terus melaksanakan pembinaan pada LPKS dan BKK sebagai mitra dalam meningkatkan keahlian pencari dan penempatan pencari.

Sesuai dengan kategori skala peringkat capaian kinerja indikator ini termasuk kategori **sangat baik**.

2. Persentase Perusahaan Dengan Tata Kelola yang Layak

Indikator kinerja ini menjadi tanggung jawab Bidang Hubungan Industrial dan Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 117.47%, dari realisasi 16.47% dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 14.00%. Artinya Sebagian besar perusahaan dikota jambi telah menerapkan tatakelola yang

layak. Untuk tahun 2025, jumlah perusahaan dengan tata kelola yang layak sebanyak 1.010 Perusahaan dan perusahaan wajib lapor sebanyak 6133 perusahaan.

Sesuai dengan kategori skala peringkat capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori **sangat baik**.

3. Persentase Koperasi Berkualitas

Indikator kinerja ini menjadi tanggung jawab Bidang Perkoperasian.

Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 93.26%, dari realisasi 43.64% terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 46,00%. Angka tersebut diperoleh dari rasio jumlah koperasi berkualitas dari jumlah koperasi aktif. Jumlah koperasi berkualitas sampai desember 2025 sebanyak 103 koperasi, dan jumlah koperasi aktif sebanyak 236 koperasi.

Dapat disimpulkan, capaian yang diperoleh indikator ini sebesar 93.24% dan sesuai kategori skala peringkat maka disimpulkan capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori **sangat baik**.

4. Persentase UMKM yang Tangguh dan Mandiri

Indikator kinerja ini menjadi tanggung jawab Bidang UMKM.

Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 150.40%, hasil dari realisasi 12.03% terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 8.00%. Angka tersebut diperoleh dari rasio jumlah UMKM naik kelas dan jumlah UMKM yang dibina. Sampai desember 2025 jumlah UMKM berwirausaha sebanyak 106 UMKM dan jumlah UMKM binaan sebanyak 881 UMKM.

Sesuai kategori skala peringkat maka disimpulkan capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Berdasarkan tabel 3.2 diatas capaian kinerja sasaran strategis diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang secara lebih rinci dapat dilihat dari tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 : Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025

No	Program	Indikator program	Rumus Perhitungan	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	$\frac{\text{Jumlah pencaker yang menjadi TKM Bekerja}}{\text{Jumlah pencaker yang dilatih}} \times 100$	69.00	71.90	104.20
2	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	$\frac{\text{Jumlah pencaker yang ditempatkan}}{\text{jumlah pencaker terdaftar}} \times 100$	51.00	60.97	119.55
3	Hubungan Industrial	Persentase Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja	$\frac{\text{Jlh Perusahaan dgn Tata Kelola yg Layak}}{\text{Jlh Perusahaan Wajib Lapo}} \times 100$	15.00	16.47	109.80
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan}}{\text{jumlah koperasi aktif}} \times 100$	32.90	61.00	185.41
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi berkualitas}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100$	8.00	33.88	423.50
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan wirausaha	$\frac{\text{Jlh UMKM yg Mengajukan Bankharkat + Jlh Fasilitasi Pemasaran (Gerai) + Jlh Peserta Pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100$	52.64	62.42	118.58

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program, telah diuraikan pada BAB I.

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 tidak dapat dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran,

karena indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi untuk Renstra 2025-2029, tidak sama dengan dengan indikator kinerja utama Renstra periode 2024-2026. Indikator Kinerja Utama (IKU) periode Renstra sebelumnya tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 : Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator	2024	
		Target	Realisasi
1.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	42.00%	51.00%
2.	Persentase Penyelesaian Perselisihan HI	100%	100%
3.	Persentase Koperasi Modern	15.46%	12.37%
4.	Persentase UMKM Naik Kelas	7.15%	5.30%

Dan target serta capaian indikator kinerja tahun 2025, sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	2025	
		Target	Realisasi
1	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	45.00%	60.97%
2	Persentase Perusahaan Dgn Tata Kelola Yg Layak	14.00%	16.47%
3	Persentase Perusahaan Dgn Tata Kelola Yg Layak	46.80%	43.64%
4	Persentase UMKM yang Tangguh dan Mandiri	8.00%	12.03%

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Untuk melihat perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah perangkat daerah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 :

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Tahun 2024-2026

No	Indikator	2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	42,00%	51,00%	45,00%	-	48,00%	-
2.	Persentase Penyelesaian Perselisihan HI	100%	100%	100%	-	100%	-
3.	Persentase Koperasi Modern	15,46%	12,37%	17,39%	-	20,00%	-
4.	Persentase UMKM Naik Kelas	7,15%	5,30%	9,66%	-	11,89%	-

No	Indikator Sasaran	2025		Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		Target	Realisasi				
1	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	45.00%	60.97%	48.00%	51.00%	54.00%	57.00%
2	Persentase Perusahaan Dgn Tata Kelola Yg Layak	14.00%	16.47%	14.50%	15.00%	15.50%	16.00%
3	Persentase Koperasi Berkualitas	46.80%	43.64%	48.60%	50.40%	52.20%	54.00%
4	Persentase UMKM yang Tangguh dan Mandiri	8.00%	12,03%	15.00%	23.00%	31.00%	39.00%

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional/Provinsi

Realisasi indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2025, tidak dapat dibandingkan dengan standar provinsi dan nasional, karena belum tersedianya data tentang target di tingkat provinsi dan nasional untuk indikator-indikator tersebut.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

I. Masalah Yang dihadapi :

1. Masih banyak dari pencaker terdaftar yang belum memiliki keahlian terutama yang berkompentensi, sehingga sulit berkompentisi di pasar kerja
2. Quota pelatihan berbasis kompetensi bagi pencaker terdaftar, masih terbatas
3. Lowongan yang tersedia di pasar kerja lebih dominan diperuntukkan bagi pencaker tamatan SMA/SMK sederajat
4. Masih kurangnya instruktur bersertifikat kompetensi untuk jenis pelatihan yang dibutuhkan di pasar kerja
5. Masih minimnya kaderisasi pengurus/pengelola koperasi, terutama dari kalangan milenial yang kreatif dan inovatif untuk membuat koperasi lebih menarik dan modern
6. Masih terbatasnya usaha koperasi pada usaha simpan pinjam
7. Masih terbatasnya jumlah pelaku UMKM yang kreatif, inovatif dan berdaya saing untuk menciptakan produk unggulan
8. Masih terbatasnya jumlah pelaku UMKM yang mampu meluaskan jaringan pemasaran secara mandiri

II. Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan :

1. Melakukan koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang

sebagai UPTD Kemenaker RI untuk memfasilitasi pengiriman pencaker terdaftar mengikuti pelatihan berkompentensi,

2. Melaksanakan kegiatan penyusunan kajian akademik untuk program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan dengan dukungan anggaran dari Kemenaker RI guna pelaksanaan pelatihan bagi pencaker yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2026
3. Membentuk kelompok UMKM baik secara mandiri ataupun yang dikoordinir oleh kantor keluarahan untuk mempermudah pendataan dan pembinaan berkelanjutan
4. Melakukan pendampingan bagi pengurus/pengelola koperasi untuk menggunakan aplikasi dalam penyusunan laporan keuangan koperasi, sebagai langkah awal menuju koperasi modern

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator sasaran. Dikatakan efisien apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan /atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran,

Berikut efisiensi dari sasaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi pada tahun 2025 :

Tabel 3.6 : Efisiensi Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1	Meningkatnya penyerapan pencari kerja dan perlindungan tenaga kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	45.00	94.32	49.32
		Persentase Perusahaan Dgn Tata Kelola Yg Layak	14.00	91.92	77.92
2	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah	Persentase Perusahaan Dgn Tata Kelola Yg Layak	46.80	93.86	47.06
		Persentase UMKM Yg Tangguh dan Mandiri	8.00	91.37	83.37

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kopeasi dan UKM telah menggunakan anggaran dengan tingkat efisiensi yang baik untuk indikator kinerja urusan ketenagakerjaan serta urusan koperasi dan umkm, dimana realisasi capaian kinerja lebih besar daripada capaian realisasi anggaran.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM merupakan perangkat daerah yang mengakomodir 2 (dua) urusan, yaitu urusan ketenagakerjaan dan urusan koperasi UKM. Di tahun 2025, telah dilaksanakan program kegiatan yang menunjang pencapaian perjanjian kinerja. Untuk sasaran strategis, terdapat 6 (enam) program pendukung, yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator program yaitu tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat.

Perhitungan diperoleh dengan menghitung jumlah pencaker yang menjadi TKM bekerja, dengan jumlah pencaker terdaftar.

Ditahun 2025 target kinerja program sebesar 69.00%, dengan realisasi 71.90%. Jumlah pencaker yang menjadi TKM bekerja sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, sedangkan jumlah pencaker terdaftar sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1.1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Indikator kegiatan yaitu Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan Kerja. Perhitungan ini diperoleh dengan menghitung rasio jumlah pencaker dilatih yang bekerja dan berwirausaha (TKM) dengan jumlah pencaker yang dilatih.

Target sebesar 70%. Di tahun 2025, jumlah peserta pelatihan sebanyak 32 orang, yang bekerja 25 orang. Dari data tersebut, diketahui capaian kegiatan ini sebesar 78.12%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

▪ Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker Berdasarkan Klaster

Indikator sub kegiatan yaitu jumlah tenaga kerja terdaftar yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Target sebanyak 32 orang, realisasi sebanyak 32 orang. Anggaran pada sub kegiatan sebesar Rp.179.738.630,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Dialokasikan untuk ATK, bahan cetak, bahan percontohan pelatihan, makan minum pelatihan, honorarium instruktur, sewa alat pelatihan, uang transport peserta,. Realisasi anggaran sebesar Rp. 168.072.899,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 93,51%. Sisa anggaran dikarenakan penyesuaian harga pasar saat proses negosiasi pengadaan barang/jasa.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator program yaitu Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri. Perhitungan diperoleh dengan menghitung rasio jumlah pencaker yang ditempatkan dengan rasio jumlah pencaker terdaftar.

Target sebesar 51%, sedangkan realisasi sebesar 60.97%. Realisasi jumlah pencaker yang ditempatkan sebanyak 503 orang, sedangkan pencaker terdaftar sebanyak 825 orang.

Program ini hanya 1 (satu) kegiatan, yaitu :

2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator kegiatan yaitu persentase serapan lowongan kerja pada IPK (Informasi Pasar Kerja). Dihitung dari jumlah pencari kerja ditempatkan yaitu dibanding jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun N.

capaian 60.97%. Angka tersebut diperoleh dari rasio jumlah pencaker yang ditempatkan sebanyak 503 orang, dan jumlah pencaker terdaftar sebanyak 825 orang

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- **Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar**

Kerja Online.

Sub kegiatan ini mengakomodir kegiatan pelayanan rutin bagi pencari kerja. Mulai dari penerbitan kartu pencari kerja (AK1) hingga kartu AK5, pelayanan konsultasi lowongan dan penempatan tenaga kerja, dan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja bagi perusahaan yang membutuhkan.

Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 42.499.450,- (empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi Rp 40.008.704,- (empat puluh juta delapan ribu tujuh ratus empat rupiah) dan dialokasikan untuk belanja ATK, bahan cetak, dan belanja SPD dalam daerah untuk melaksanakan monev penempatan pencari terdaftar ke perusahaan.

Sisa anggaran dari penyesuaian harga pasar saat proses negosiasi pengadaan barang jasa.

3. Program Hubungan Industrial

Indikator program Hubungan Industrial yaitu jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja. Dihitung dari rasio jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak dengan jumlah perusahaan (yang terdaftar pada aplikasi wajib lapor)

Di tahun 2025 target sebesar 15,00% , realisasi sebesar 16.47% yang diperoleh dari rasio jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak sebanyak 1010 perusahaan dan jumlah perusahaan yang terdaftar pada aplikasi wajib lapor sebanyak 6.133 perusahaan.

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

3.1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu persentase peningkatan perusahaan yang memiliki PP (Peraturan Perusahaan). Dihitung dari rasio jumlah perusahaan yang memiliki PP dengan jumlah perusahaan yang memiliki pekerja di atas 10 orang (yang terdaftar pada aplikasi wajib lapor). Indikator ini ditetapkan karena jumlah perusahaan yang memiliki PP merupakan salah satu faktor pendukung tata kelola yang layak bagi suatu perusahaan. Sehingga capaian kinerja kegiatan ini ikut menentukan capaian kinerja programnya.

Tahun 2025 target sebesar 22.5%, dan realisasi sebesar 34,66%. Diperoleh dari perhitungan rasio jumlah perusahaan yang memiliki PP sebanyak 96 perusahaan dan jumlah perusahaan yang memiliki pekerja di atas 10 pekerja (terdaftar dalam aplikasi wajib lapor) sebanyak 277 perusahaan.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan**

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah data dan informasi sarana hubungan industrial dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan.

Target sebanyak 12 laporan, realisasi sebesar 12 laporan. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 23.144.370,- (dua puluh tiga

juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Dialokasikan untuk belanja ATK, bahan cetak, makan minum rapat dan perjalanan dinas dalam daerah untuk mendata dan memonitoring kelengkapan sarana hubungan industrial pada perusahaan.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 22.674.810,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 97.97%. Sisa anggaran dikarenakan penyesuaian harga pasar pada proses negosiasi pengadaan barang jasa.

3.2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama. Dihitung dari rasio jumlah perselisihan HI yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dengan jumlah kasus yang dicatatkan.

Indikator ini ditetapkan karena penyelesaian perselisihan HI dengan perjanjian bersama merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembinaan ketenagakerjaan bagi pekerja dan pengusaha, serta berjalannya fungsi lembaga bipartite/tripartite yang aspek pendukung capaian target tata kelola yang layak di suatu perusahaan.

Di tahun 2025 target sebesar 75%, realisasi sebesar 100%. Diperoleh dari rasio jumlah penyelesaian perselisihan HI dengan PB sebanyak 50 kasus dan jumlah kasus yang dicatatkan sebanyak 50 kasus.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

▪ **Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan yaitu jumlah LKS Tripartit yang dibina. Untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota LKS Tripartit berjumlah 1 (satu) lembaga. Lembaga tripartit Kota Jambi tetap aktif untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM dalam membahas dan mencari solusi terhadap isu dan permasalahan ketenagakerjaan.

Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 886.478.597,- (delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan dialokasikan untuk belanja ATK, bahan cetak, makan minum rapat, honorarium pengurus LKS Tripartit, honorarium Dewan Pengupahan Kota Jambi, Honorarium narasumber sosialisasi organisasi pengusaha dan serikat buruh (SB)/serikat pekerja (SP), dan bantuan jamsostek bagi pekerja rentan.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 813.454.341,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) atau sebesar 91,76%. Sisa anggaran dikarenakan penyesuaian harga pasar pada proses negosiasi pengadaan barang jasa.

4. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi

Indikator program yaitu Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan. Dihitung dari rasio jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan dengan jumlah koperasi aktif.

Di tahun 2025 target sebesar 32.90%, realisasi sebesar 61,00%. Realisasi diperoleh dari rasio jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan 186 orang dan jumlah koperasi aktif 304.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

4.1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu persentase peningkatan pengurus/pengelola koperasi yang berkompetensi. Dihitung dari rasio jumlah pengurus/pengelola koperasi bersertifikat kompetensi tahun 2025 dengan jumlah pengurus/pengelola koperasi tahun 2025.

Target sebesar 29,5%, realisasi 30,93%. Diperoleh dari rasio jumlah pengurus/pengelola koperasi bersertifikat kompetensi 219 orang dan jumlah pengurus/pengelola koperasi 708 orang.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- **Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pekoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**

Indikator sub kegiatan yaitu jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian. Target sebanyak 50 orang dan terealisasi sebanyak 50 orang. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 80.964.414,- (delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah) dan dialokasikan untuk belanja ATK, bahan cetak, makan minum peserta dan panitia, honorarium narasumber pelatihan, publikasi, dan uang transport peserta.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan beberapa pelatihan yang

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus/pengelola dan pengawas serta anggota koperasi dalam mengembangkan koperasinya.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 80.153.020,- (delapan puluh juta seratus lima puluh tiga ribu dua puluh rupiah) atau sebesar 99,00%.

Sisa anggaran dikarenakan penyesuaian harga pasar pada proses negosiasi pengadaan barang jasa.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Indikator program yaitu persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas. Dihitung dari rasio jumlah koperasi yang berkualitas dengan jumlah koperasi aktif.

Target sebesar 8.00%, dan realisasi sebesar 33.88%. Jumlah koperasi berkualitas 103 dan jumlah koperasi aktif 304.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

5.1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu persentase peningkatan volume usaha/omset koperasi di tahun n. Dihitung dari rasio jumlah omset koperasi tahun ini dikurangi jumlah omset koperasi tahun lalu, dibagi omset koperasi tahun lalu.

Target sebesar 10% dan realisasi sebesar 53,09%. Angka realisasi diperoleh dari jumlah omset tahun 2025 (Rp. 1.740.370.396.719,-) dikurangi jumlah omset tahun 2024 (Rp. 1.136.781.120.205,-), yaitu : Rp. 603.589.276.514,- dibagi omset tahun 2024 sebesar Rp. 1.136.781.120.205,- dikali 100%.

Kegiatan ini terdiri dari 4 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- **Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan yaitu jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota.

Target sebanyak 55 unit usaha koperasi, dan terealisasi 55 unit usaha koperasi. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 48.613.469,- (empat puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan dialokasikan untuk belanja ATK, bahan cetak, belanja makan minum peserta dan panitia, honorarium narasumber, uang transport peserta dan perjalanan dinas dalam daerah untuk melakukan pendampingan ke koperasi.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan bimtek penyusunan peraturan kelembagaan koperasi, dan juga dilaksanakan pendampingan bagi koperasi dalam mengelola unit usaha dan ketertiban administrasi kelembagaan.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 47.523.216,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) atau sebesar 97,76%. Sisa anggaran dikarenakan penyesuaian harga pasar pada proses negosiasi pengadaan barang jasa.

- **Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi**

Indikator sub kegiatan yaitu jumlah pembinaan dan/atau pendampingan yang dilaksanakan.

Target sebanyak 10 kelompok masyarakat, dan terealisasi 8 kelompok masyarakat. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 43.733.049,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah) dan dialokasikan untuk belanja ATK, bahan cetak, belanja makan minum, perjalanan dinas dalam daerah untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan ke koperasi.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 41.279.771,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sebesar 94,39%. Sisa anggaran dikarenakan penyesuaian harga pasar pada proses negosiasi pengadaan barang jasa.

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi**

Indikator sub kegiatan yaitu jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya.

Target sebanyak 68 unit usaha, dan terealisasi 68 unit usaha. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 346.896.436,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan dialokasikan untuk belanja ATK, bahan cetak, belanja makan minum peserta, honorarium narasumber, uang transport peserta, uang pembentukan badan

hukum koperasi merah putih dan untuk melakukan pendampingan ke koperasi.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 318.170.176,- (tiga ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 91,72%. Sisa anggaran dikarenakan penyesuaian harga pasar pada proses negosiasi pengadaan barang jasa.

▪ **Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi**

Indikator sub kegiatan yaitu jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota.

Target sebanyak 20 unit usaha, dan terealisasi 30 unit usaha. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 24.397.987,- (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan dialokasikan untuk belanja ATK, bahan cetak, belanja makan minum peserta, honorarium narasumber, dan uang transport peserta.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 24.044.175,- (dua puluh empat juta empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 98.55%. Sisa anggaran dikarenakan penyesuaian harga pasar pada proses negosiasi pengadaan barang jasa.

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator program yaitu persentase Pertumbuhan Wirausaha. Dihitung dari rasio jumlah UMKM yang mengusulkan banharkat + Difasilitasi Pemasaran + peserta dengan jumlah UMKM binaan.

Target sebesar 52.64% dan terealisasi sebesar 62.42%. Jumlah UMKM

yang mengusulkan banharkat + peserta pelatihan + penerima bantuan sebanyak 550 orang dan jumlah UMKM binaan 881 UMKM.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

6.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Indikator kegiatan yaitu persentase pelaku UMKM binaan. Dihitung dari rasio jumlah UMKM yang telah dibina dan jumlah UMKM yang didata.

Target sebesar 6,50%, terealisasi 18.55%. Ditahun 2025 jumlah UMKM binaan 881 UMKM, jumlah UMKM yang telah terdata untuk dibina 47.770 orang.

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

- **Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro**

Indikator sub kegiatan jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan. Target sebanyak 50 orang dan terealisasi 55 orang pelaku UMKM.

Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 215.183.340,- (dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan dialokasikan untuk belanja ATK, bahan cetak, makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, belanja sewa peralatan untuk pelatihan.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 196.636.640,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat

puluh rupiah) atau sebesar 91.38%. Sisa anggaran dikarenakan penyesuaian harga pasar pada proses negosiasi pengadaan barang jasa.

- **Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**

Indikator sub kegiatan yaitu jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro.

Target sebanyak 1.500 unit usaha, terealisasi sebanyak 1.619 unit usaha. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.115.908.029,- (satu milyar seratus lima belas juta sembilan ratus delapan ribu dua puluh sembilan rupiah). Anggaran tersebut diperuntukkan rekening ATK, cetak, honorarium narasumber, sewa tenda meja kursi, SPD dalam daerah kegiatan survey bantuan barang, uang saku peserta dan bantuan hibah barang bagi pelaku UMKM.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.015.308.724,- (satu milyar lima belas juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). Sisa anggaran karena penyesuaian harga pasar dalam proses negosiasi pengadaan barang dan jasa.

Adapun bantuan hibah barang bagi pelaku UMKM di tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

No.	Uraian	Spek	Jumlah
1	BLENDER	2 L	4
2	CHOPPER DAGING	MITO CH 200	4
3	COMPRESOR	24 L	5
4	COOLER BOX	24 L	1
5	DANDANG BAKSO	37 cm	1
6	ETALASE (KUE/TOKO/BARANG DLL)	P 100 L 39,5 T 104	29
7	ETALASE (KUE/TOKO/BARANG DLL)	P 1,5 M L 50 T 104	1
8	ETALASE (KUE/TOKO/BARANG DLL)	P 2 M T 104 CM	1
9	ETALASE (KUE/TOKO/BARANG DLL)	P 3 M T 104 CM	1
10	ETALASE (TEKWAN/SIOMAY/BAKSO DLL)	P 100 L 54 T 180 PAKAI RODA BULAT	2
11	ETALASE AYAM GEPREK	P 50 T 55 L BAWAH 40 L ATAS 35	1
12	ETALASE KELILING	P 135 L 44 T 130 PAKAI RODA BAN	6
13	ETALASE KONTER	P 1 M L ATAS 44 CM L BAWAH 35 CM T 80 CM	1
14	ETALASE SARAPAN PAGI	P 125 L 55 T 180	32
15	ETALASE SARAPAN PAGI	P 150 CM L 70 CM T 185 CM	1
16	FREEZER	UK 100 L	21
17	GERGAJI MESIN	MAKITA	1
18	GEROBAK BUAH	3 RODA	1
19	GEROBAK ES TEBU	120X160X50 CM	1

20	HANDRESS KANCING	HANDPRESS + MATRAS	1
21	KOMPOR GAS	1 TUNGKU UKURAN BESAR	14
22	KOMPOR GAS	2 TUNGKU	8
23	KOMPOR GAS	API SERIBU	12
24	KOMPOR GAS 2 TUNGKU	RI-712A	1
25	KOMPOR PANGGANGAN	API 2	1
26	KUALI	36 inci	2
27	KUKUSAN/DANDANG/PERIUK	45 CM	9
28	KURSI DUDUK	T 58-78 CM	1
29	KURSI PANGKAS RAMBUT	Kursi dan Sandaran	1
30	LEMARI ETALASE	P 1 M X 180 CM	3
31	LOYANG OVEN	90X40 CM	3
32	LOYANG OVEN	60X40 CM	2
33	MAGICOM	5,4 Ltr	4
34	MEJA LIPAT	MEJA+6 KURSI	2
35	MESIN CETAK BAKSO	RANGKA 42x80x84 CM	1
36	MESIN CLIPPER	TANPA KABEL	1
37	MESIN CUCI	16 KILO	1
38	MESIN CUCI	10 KILO	4
39	MESIN GILING MIE	DJJ200 (Lebar Roller 20 cm)	1

40	MESIN JAHIT	SINGER 3232	29
41	MESIN KOPI	AZKO 120 WATT	5
42	MESIN OBRAS	GN 1- 1	4
43	MESIN PARUT KELAPA	BESI STEANLES	1
44	MESIN PENGADUK ADONAN MIE	8 KG	1
45	MESIN PENGERING MAKANAN	MERЕК FOMAC	1
46	MESIN POTONG ROTI	ZEPPELIN	1
47	MESIN PRES MINUMAN / CUP SEALER	ADVANCE SLC 100	3
48	MESIN PRESS SABLON KAOS 38X38	38x 38	1
49	MESIN ROUTER	MAKTEC	2
50	MESIN SPINNER	20 L	1
51	MESIN SPINNER	12 L	3
52	MESIN STEAM	MULTI PRO	3
53	MICROWAVE	23 L	1
54	MIXER	BIASA HAND	1
55	MIXER	GRANDE 5L	12
56	MIXER	15 L	2
57	MIXER/BAKING LAMPU	BEKING BIMA	1
58	OVEN GAS	2 Tingkat	15
59	OVEN GAS	1 Tingkat	16

60	OVEN GAS	GETRA	1
61	OVEN GAS	TANGKRING BESAR	1
62	OVEN LISTRIK	22 L	5
63	OVEN LISTRIK	19 L	1
64	PANCI KLAKAT	(ISI 4 SUSUN)	2
65	PAYUNG TENDA	2 LAPIS	1
66	PENANAK NASI	WIN GAS	2
67	PENETAS TELUR	200 EKOR	1
68	PENETAS TELUR	100 EKOR	1
69	PRESTO	8 L	1
70	PRINTER KERTAS	EPSON L3211	1
71	RAK CIKI	TENGAH	1
72	RAK GONDOLA	T120 DOUBLE JOIN	1
73	RAK JUALAN BESI	TINGKAT BESI	1
74	RAK LOYANG	15 TINGKAT	1
75	RAK PIRING/GELAS/KOMPOR	P 1M L 50	3
76	SEALER PLASTIK	BIASA	2
77	SEGEL VACUM	30 CM	1
78	SETRIKA	UAP	1
79	SETRIKA	BOILER	1

80	SHOWCASE	4 RAK	1
81	SHOWCASE	3 RAK	7
82	TENDA	2MX2M	2
83	TENDA	3MX3M	1
84	TERMOS NASI	30 L	1
85	TERMOS NASI	6 L	5
86	TIMBANGAN	100 KILO	2
87	TIMBANGAN	10 KG	1
88	VACUM CLEANER	30 LITER	1

▪ **Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro**

Indikator sub kegiatan jumlah usaha mikro yang terfasilitasi. Target sebanyak 50 unit usaha dan terealisasi 157 unit usaha.

Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 49.271.610,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan dialokasikan untuk belanja ATK, bahan cetak, makan minum rapat, belanja honorarium narasumber.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 47.281.595,- (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima) atau sebesar 97.75%. Sisa anggaran dikarenakan penyesuaian harga pasar pada proses negosiasi pengadaan barang jasa.

▪ **Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data**

Indikator sub kegiatan jumlah usaha mikro yang terdata. Target sebanyak 40 unit usaha orang dan terealisasi 40 unit usaha .

Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 32.017.438,- (tiga puluh dua juta tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan dialokasikan untuk belanja ATK, bahan cetak, makan minum rapat, belanja honorarium narasumber.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 47.281.595,- (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 97.75%. Sisa anggaran dikarenakan penyesuaian harga pasar pada proses negosiasi pengadaan barang jasa.

3.2. Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 87.36% dari total yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 : Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
BIDANG SEKRETARIAT				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 6,847,986,125.50	Rp 5,826,197,900.00	85.08
1.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp 37,714,690.00	Rp 34,717,745.00	92.05
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 24,865,300.00	Rp 22,456,545.00	90.31
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp 12,849,390.00	Rp 12,261,200.00	95.42

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Rp 5,781,103,415.43	Rp 4,839,258,433.00	83.71
1.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5,551,547,000.00	Rp 4,610,145,933.00	83.04
2.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 212,666,280.43	Rp 212,660,000.00	100.00
3.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 16,890,135.00	Rp 16,452,500.00	97.41
3.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Rp 10,940,300.00	Rp 7,935,309.00	72.53
1.		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 10,940,300.00	Rp 7,935,309.00	72.53
4.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Rp 74,625,000.00	Rp 61,178,200.00	81.98
1.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 58,275,000.00	Rp 45,880,000.00	78.73
2.		Sosialisasi Peraturan Perundang - Undang	Rp 13,950,000.00	Rp 13,648,200.00	97.84
3.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 2,400,000.00	Rp 1,650,000.00	68.75
5.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Rp 357,980,800.00	Rp 337,281,979.00	94.22
1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4,921,380.00	Rp 4,872,900.00	99.01
2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 85,499,605.00	Rp 68,063,400.00	79.61
3.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 20,749,815.00	Rp 18,954,100.00	91.35
4.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 11,660,000.00	Rp 11,306,500.00	96.97
5.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 235,150,000.00	Rp 234,085,079.00	99.55
6.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Rp 68,693,279.07	Rp 64,500,779.00	93.90
1.		Pengadaan mebel	Rp 33,300,000.00	Rp 29,137,500.00	87.50
2.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 35,393,279.07	Rp 35,363,279.00	99.92
7.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Rp 164,821,857.00	Rp 159,451,671.00	96.74
1.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 58,080,037.00	Rp 55,274,650.00	95.17
2.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 106,741,820.00	Rp 104,177,021.00	97.60
8.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Rp 352,106,784.00	Rp 321,873,784.00	91.41

	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 285,506,784.00	Rp 257,023,584.00	90.02
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 66,600,000.00	Rp 64,850,200.00	97.37
BIDANG PENTA					
1.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Rp 192,094,130.00	Rp 176,975,629.00	92.13
	1.	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Rp 179,738,630.00	Rp 168,072,899.00	93.51
	1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 179,738,630.00	Rp 168,072,899.00	93.51
	2.	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	Rp 12,355,500.00	Rp 8,902,730.00	72.05
	1.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 12,355,500.00	Rp 8,902,730.00	72.05
2.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Rp 129,579,005.00	Rp 126,412,554.00	97.56
	1.	PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 26,079,555.00	Rp 25,643,850.00	98.33
	1.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Rp 26,079,555.00	Rp 25,643,850.00	98.33
	2.	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Rp 103,499,450.00	Rp 100,768,704.00	97.36
	1.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp 42,449,450.00	Rp 40,008,704.00	94.25
	2.	Job Fair	Rp 61,050,000.00	Rp 60,760,000.00	99.52
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL					
1.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Rp 909,622,967.50	Rp 836,129,151.00	91.92
	1.	PENGESAHAN PERATURAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN	Rp 23,144,370.00	Rp 22,674,810.00	97.97
	1.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Rp 23,144,370.00	Rp 22,674,810.00	97.97
	2.	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN	Rp 886,478,597.50	Rp 813,454,341.00	91.76

	1.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Rp 886,478,597.50	Rp 813,454,341.00	91.76
BIDANG KOPERASI					
1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Rp 80,964,414.00	Rp 80,153,020.00	99.00
	1.	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 80,964,414.00	Rp 80,153,020.00	99.00
	1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp 80,964,414.00	Rp 80,153,020.00	99.00
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Rp 463,640,941.00	Rp 431,017,338.00	92.96
	1.	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 463,640,941.00	Rp 431,017,338.00	92.96
	1.	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Rp 43,733,049.00	Rp 41,279,771.00	94.39
	2.	Fasilitasi Kemitraan Koperasi Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	Rp 346,896,436.00	Rp 318,170,176.00	91.72
	3.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp 48,613,469.00	Rp 47,523,216.00	97.76
	4.	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 24,397,987.00	Rp 24,044,175.00	98.55
BIDANG UMKM					
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Rp 1,412,380,417.00	Rp 1,290,523,409.00	91.37
	1.	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN, PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN	Rp 1,412,380,417.00	Rp 1,290,523,409.00	91.37

PARA PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp 1,115,908,029.00	Rp 1,015,308,724.00	90.98
2.	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Rp 49,271,610.00	Rp 47,281,595.00	95.96
3.	Penyusunan Basis Data	Rp 32,017,438.00	Rp 31,296,450.00	97.75
4.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp 215,183,340.00	Rp 196,636,640.00	91.38
Total		Rp 10,036,268,000.00	Rp 8,767,409,001.00	87.36

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM sudah cukup baik, meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditindaklanjuti mengingat pembangunan bidang ketenagakerjaan dan bidang koperasi UMKM termasuk dalam urusan wajib pemerintah, karena bersinggungan langsung dengan kegiatan perekonomian di tengah masyarakat dan berdampak pada capaian isu-isu strategis nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji, tunjangan PNS dan kegiatan rutin lainnya) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 : Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya penyerapan pencari kerja dan perlindungan tenaga kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	45.00	60.97	135.49	Rp 321,673,135	Rp 303,388,183	94.32
		Persentase Perusahaan Dgn Tata Kelola Yg Layak	14.00	16.00	114.29	Rp 909,622,967	Rp 836,129,151	91.92
2	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah	Persentase Koperasi Berkualitas	46.80	43.64	93.25	Rp 544,605,355	Rp 511,170,358	93.86
		Persentase UMKM Yg Tangguh dan Mandiri	8.00	12.03	150.40	Rp 1,412,380,417	Rp 1,290,523,409	91.37

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM tahun 2025 sudah cukup baik, meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditindaklanjuti mengingat pembangunan bidang ketenagakerjaan dan bidang koperasi UMKM termasuk dalam urusan wajib pemerintah, karena bersinggungan langsung dengan kegiatan perekonomian di tengah masyarakat dan berdampak pada capaian isu-isu strategis nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Masalah-masalah yang menjadi hambatan pencapaian kinerja diharapkan dapat diminimalisasikan dengan upaya konkrit yang berkesinambungan dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Karena ke depan, tantangan yang akan dihadapi semakin berat terutama dengan kemajuan teknologi yang menjadikan semua pelayanan dan kegiatan masyarakat berbasis aplikasi.

Untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang berkompetensi, koperasi modern, produk-produk UMKM unggul dan berdaya saing tentu diperlukan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, karena itu sangat dibutuhkan perencanaan program kegiatan yang berorientasi pada hasil maksimal dan teknis pelaksanaan yang mampu meminimalkan resiko kegagalan pencapaian target, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

4.2. Rencana Tindaklanjut

Rencana tindaklanjut yang diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM kedepannya, antara lain :

1. Meningkatkan peran sebagai fasilitator bagi pencari kerja terdaftar untuk dapat mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Kemaker RI, sehingga quota pencaker terdaftar yang dapat mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dapat bertambah;
2. Meningkatkan sinergi dengan Bursa Kerja Khusus (BKK), Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta (LPKS) dan perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan untuk memaksimalkan penyerapan pencaker pada pasar kerja;
3. Melaksanakan sosialisasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di aplikasi wajib lapor untuk memenuhi sarana dan prasarana sesuai ketentuan ketenagakerjaan;
4. Meningkatkan kapasitas pengurus/pengelola dan pengawas koperasi melalui pelatihan berbasis IT, agar mampu mengelola koperasi menjadi koperasi modern;
5. Melaksanakan pendampingan pada kelompok-kelompok UMKM yang telah dibentuk agar memenuhi administrasi secara tertib dan fokus pembinaan lebih diprioritaskan pada UMKM yang mandiri, inovatif, kreatif dan mampu menciptakan produk unggulan sehingga produk yang dihasilkan layak untuk dipasarkan ke level yang lebih tinggi.